

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Robert A. Dahl, mengemukakan bahwa pemilu merupakan komponen utama dalam *polyarchy* (pemerintahan oleh banyak orang) sebuah bentuk demokrasi modern yang dicirikan oleh kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, serta keberadaan kompetisi yang terbuka dan adil dalam perebutan kekuasaan politik.¹ Dalam kerangka ini, pemilu tidak sekadar mekanisme teknis untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi arena interaksi antara masyarakat dan negara dalam membentuk kebijakan publik. Pemilu yang sehat dan demokratis menuntut adanya akses informasi politik yang memadai, kebebasan memilih tanpa tekanan, serta keberadaan lembaga penyelenggara yang independen.

Pemilihan umum artinya masyarakat beraktivitas melakukan pemilihan seseorang atau kelompok untuk menduduki posisi memimpin rakyat, pimpinan negara atau pemerintahan. Dapat diartikan pemerintah dipilih oleh rakyat. Semua penduduk wilayah berhak yang sama dalam memilih calon kandidat yang akan menjadi pemimpin mereka, dengan pemilihan umum terdapat prosedur politik dalam menerangkan pendapat serta tujuan masyarakat pada tahap pemilihan beberapa elemen masyarakat untuk dijadikan pimpinan pemerintah. Pemilu di Indonesia terus menjadi isu

¹ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), hlm. 220–222.

.kontroversial sejak era pasca-kejatuhan Orde Baru. Bahkan, keberadaan lembaga pengawas pemilu tidak mampu sepenuhnya meredam perdebatan yang muncul terkait pelaksanaannya, tetapi cara-cara kampanye yang berbagai macam cara yang muncul untuk memperkenalkan calon kandidat yang akan melaju pada kontes demokrasi.

Pada 2024 Indonesia mengadakan pesta demokrasi pemilihan umum dan pemilihan legislatif. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terdapat beberapa konsekuensi fundamental yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan dan hasil pemilihan legislatif.² Indonesia menggunakan system proporsional terbuka, dimana masyarakat yang memilih tidak sekedar melakukan pilihan terhadap kelompok politik tetapi calon anggota legislatif yang juga dengan langsung mendatangi lokasi tempat pemungutan suara (TPS) terdekat. Dimana tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pemilihan umum secara langsung guna menggunakan hak suaranya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden beserta calon anggota legislatif.

Pemilihan legislatif merupakan proses pemilihan yang dilakukan guna menentukan personel legislatif di tingkatan nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. pemilihan legislatif merupakan konsekuensi fundamental dalam penyelenggaraan demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

² *Undang -Undang Tentang Pemilihan Umum*, Unadang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³ Perundangan tersebut menjadi suatu landasan fundamental untuk mengatur berbagai macam aspek tentang pilihan legislatif serta presiden dan wakil presiden mengenai ketentuan dasar kampanye. Hal ini memungkinkan calon anggota legislatif yang berasal dari kelompok politik yang sama akan saling berkompetisi, dan calon dengan memiliki suara terbanyak akan menang. Sehingga calon legislatif perlu berupaya keras dalam kampanye individual.

Para calon anggota DPRD saling memperebutkan kursi panas terutama pada pemilihan legislatif, di Dapil Simalungun 1 para calon kandidat saling mengusung visi dan misi yang beragam. Keragaman yang terjadi mencerminkan dinamika politik lokal dan dapat memberikan pilihan atau informasi yang luas bagi masyarakat pemilih.

Pelaku politik senantiasa memperhatikan tingkatan kontribusi politik oleh rakyat untuk memilih lembaga legislatif, yang berperan penting dalam menentukan hasil pemilihan. Mengingat signifikansi partisipasi ini bagi kepentingan politik, setiap kandidat berupaya memengaruhi keterlibatan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan kampanye politik. Melalui penerapan strategi yang dirancang dalam kampanye, para kandidat dapat menyampaikan pesan serta visi masa depan guna

³ *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Undang-Undang Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.

membentuk opini, sikap, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung calon anggota DPRD.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan kampanye pemilihan umum, yang mencakup atas pemilihan legislatif dan pilihan presiden. Peraturan ini juga mencakup penyusunan pedoman teknis kampanye bagi calon anggota legislatif (caleg). Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota menggunakan pedoman teknis tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan tahapan kampanye pemilihan anggota legislatif.⁴ Setiap pasangan calon (paslon) yang berpartisipasi dalam pemilu diwajibkan untuk memiliki Alat Peraga Kampanye (APK) yang pemasangannya dilakukan oleh KPU. Peraturan ini membatasi jumlah APK yang dapat digunakan serta bertujuan untuk mencegah terjadinya kampanye yang bersifat berlebihan.

Penggunaan pesan yang disampaikan melalui strategi kampanye dapat berupa alat peraga. Baliho sebagai contoh dari APK akan disebar di tempat-tempat yang strategis dan ramai oleh calon-calon kandidat dan tim suksesnya di daerah masing-masing. Termasuk yang dilakukan oleh calon anggota legislatif Dapil Simalungun 1.

Tabel 1.1
Daftar Calon DPRD Kabupaten Simalungun tahun 2024

No	Nama Partai	Daftar Calon DPRD Kab. Simalungun
1	PKB	7
2	GERINDRA	9

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kampanye

3	PDIP	9
4	GOLKAR	9
5	NASDEM	9
6	PARTAI BURUH	1
7	PKS	7
8	HANURA	9
9	PBB	2
10	DEMOKRAT	9
11	PSI	6
12	PERINDO	9
	Total	86

Sumber: KPU Kabupaten Simalungun 2024

Alat peraga kampanye melalui baliho adalah Solusi yang dipergunakan untuk mengkampanyekan adanya pemilu. Dimana para caleg menggunakan alat peraga kampanye ini sebagai media dalam iklan politik.⁵ Meskipun metode kampanye ini merupakan metode tradisional tetapi para calon anggota legislatif eksekutif dalam menggunakan media cetak baliho sebagai salah satu alat peraga kampanye yang bertujuan untuk menyampaikan visi misi para calon. Faktor keunggulan baliho sebagai alat kampanye adalah dapat diletakkan berbagai titik Lokasi yang mana ramai warga melewatinya dan berbentuk gambar yang besar sehingga dapat menarik perhatian masyarakat.

Alat peraga kampanye (APK) sebagai suatu sarana yang terus ditemui pada acara pemilu Indonesia, bisa berupa bendera, spanduk, brosur dan bendera. Isi dari

⁵ Hakim, Lukmanul. (2021). "Pengaruh Penempatan Baliho Kampanye Terhadap Citra Calon Pemimpin pada Pemilihan Umum di Indonesia." Jurnal Politik Profetik, Vol. 5(2), hlm. 123-136.

materi kampanye mencakup visi, misi, serta program kerja kandidat atau pasangan kandidat, disertai dengan elemen visual seperti gambar dan slogan. Tujuan utama dari pesan atau elemen visual ini adalah untuk memotivasi masyarakat agar memberikan dukungan suara kepada kandidat atau pasangan kandidat tersebut.

Keberadaan baliho sebagai APK berperan besar dalam memikat ateni public karena sifatnya yang visual dan mudah diakses. Dengan menampilkan gambar, slogan, dan pesan-pesan politik, baliho diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemilih mengenai calon-calon yang bersaing dalam pemilihan legislatif.⁶ Terlebih lagi, di era digitalisasi dan media sosial, baliho tetap menjadi menjadi alat peraga kampanye yang sering digunakan, terutama di daerah Kabupaten Simalungun, Kecamatan Purba, Sumatera Utara yang akses ke internetnya terbatas atau belum merata.

Masyarakat Kecamatan Purba itu masih mendapatkan informasi dari media cetak, media digital serta APK seperti surat kabar, radio, televisi, baliho, poster, dan spanduk, bukan melalui para calon-calon anggota legislatifnya langsung. Mengetahui baliho masih sangat mempengaruhi dalam mengumpulkan suara dari masyarakat pedesaan sehingga para calon berlomba-lomba menggunakan metode kampanye tersebut.

⁶ Aditya, R., & Pramudya, A. (2020). Kebijakan Pemasangan Baliho Kampanye dan Dampaknya terhadap Tata Ruang Kota: Studi Kasus Kota Bandung. *Jurnal Perencanaan Kota dan Wilayah*, 5(1), 45-56.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah instansi yang berwenang memantau pelaksanaan pemilihan yang ada di Indonesia. Bawaslu berperan penting untuk memberikan pengawasan dan menertipkan pemasangan baliho atau alat peraga kampanye (APK). Terkait dengan pemasangan baliho bawaslu memiliki tugas untuk memastikan bahwa pemasangan APK berdasar pada tata tertib yang ditentukan KPU. Seperti lokasi pemasangan, ukuran dan jumlah, izin pemasangan dan lain sebagainya.

Adapun penertipan yang dilakukan oleh bawaslu merupakan upaya pengawasan pemilu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penertipan dilakukan Ketika ditemukan pelanggaran dalam pemasangan atau konten terkait APK selama masa kampanye. Dimana yang terjadi pada saat pemasangan baliho sering sekali di pasang sebelum tanggal yang sudah ditetapkan oleh bawaslu, sehingga masyarakat dapat mengetahui calon-calon presiden dan anggota legislatif lebih cepat.⁷

Yang menjadi masalah pada kampanye politik dan tim suksesnya adalah dimana terdapat 14 desa dan hanya 4 desa yang memiliki akses jaringan yang memadai, 10 desa lainnya masih jauh dari perkotaan sehingga akses jaringan masih sangat susah, ada beberapa tempat yang sama sekali tidak memiliki akses jaringan.⁸ Maka masyarakat jarang sekali menggunakan handphone untuk melihat iklan politik bakal calon yang sedang bersaing untuk memperebutkan kursi panas DPRD dapil Simalungun

⁷ Tempo. (2019). Peraturan Kampanye Pemilu: Cara Pemasangan Baliho dan Spanduk yang Sesuai Aturan . Diakses dari <https://tempo.co>

⁸ Diakses dari internet Kodepos diakses pada 23 September 2024, <https://kodepos.cektarif.com/indonesia/desa/purba-342723>

1. Masih terdapatnya banyak masyarakat yang apatis dan tidak tertarik terhadap politik dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan.

Kecamatan Purba terletak di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan kondisi geografis yang bervariasi. Kecamatan ini meliputi atas 13 desa dan 1 kelurahan yang tersebar di daerah pegunungan dan perbukitan. Sehingga akses jaringan yang tidak merata, beberapa desa mengalami kesulitan dalam hal akses jaringan telekomunikasi dan internet. Meskipun beberapa desa di kecamatan ini sudah terjangkau oleh sinyal operator seluler, tetapi tidak semua wilayah memiliki kualitas sinyal yang memadai. Di desa-desa yang lebih terpencil atau berbukit, sinyal telekomunikasi cenderung lemah, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses informasi yang tersedia secara online, termasuk media sosial atau portal berita yang dapat memberikan informasi politik.

Tabel 1.2
Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Purba Tahun 2019 Dan 2024

No	Nama Desa	Daftar Pemilih Tetap 2019	Daftar Pemilih Tetap 2024
1	Purba Tengah	1.072	1.273
2	Pematang Purba	1.605	2.083
3	Urung Purba	1.375	1.575
4	Purba Sipingan	1.463	1.741
5	Hinalang	1.602	2.001
6	Purba Dolok	968	1.100
7	Tano Tinggir	807	959
8	Tiga Runggu	2.457	3.547
9	Saribu Jandi	970	1.257
10	Huta Raja	799	884

11	Bandar Sauhur	562	667
12	Bunga Sampang	396	492
13	Nagori Tongah	811	1.110
14	Urung Pane	1.263	1.532
	Total	16.150	20.221

Sumber: KPU Kabupaten Simalungun 2024

Berdasar pada tabel yang disajikan, menyatakan bahwasanya pemilih tetap paling banyak ada di desa Tiga Runggu, pada tahun 2019 sebanyak 2.457 dan pada tahun 2024 sebanyak 3.547. Desa Purba Tongah, pada tahun 2019 sebanyak 1.072 dan pada tahun 2024 sebanyak 1.273 pemilih, Desa Pematang Purba, pada tahun 2019 sebanyak 1.605 dan pada tahun 2024 sebanyak 2.083 pemilih, Desa Urung Purba, tahun 2019 sebanyak 1.375 dan tahun 2024 sebanyak 1.575 pemilih, Desa Purba Sipingingan, tahun 2019 sebanyak 1.463 dan tahun 2024 sebanyak 1.741 pemilih, Desa Hinalang tahun 2019 sebanyak 1.602 dan tahun 2024 sebanyak 2.001 pemilih, Desa Purba Dolok, tahun 2019 sebanyak 968 dan tahun 2024 sebanyak 1.100 pemilih, Desa Tano Tinggi, pada tahun 2019 sebanyak 807 dan tahun 2024 sebanyak 959 pemilih, Desa Saribu Jandi, tahun 2019 sebanyak 970 dan tahun 2024 1.257 pemilih, Desa Huta Raja, tahun 2019 sebanyak 799 dan tahun 2024 sebanyak 884 pemilih, Desa Bandar Sauhur, tahun 2019 sebanyak 562 dan tahun 2024 sebanyak 667 pemilih, Desa Bunga Sampang, tahun 2019 sebanyak 396 dan tahun 2024 sebanyak 492 pemilih, Desa Nagori Tongah, tahun 2019 sebanyak 811 dan tahun 2024 sebanyak 1.110 pemilih, Desa Urung Pane, pada tahun 2019 sebanyak 1.263 dan tahun 2024 sebanyak 1.532

pemilih. Jumlah pemilih di Kecamatan Purba pada tahun 2019 sebanyak 16.150 dan tahun 2024 sebanyak 20.221 pemilih.⁹

Tabel 1.3
Data Partisipasi Pemilih di Kecamatan Purba Pada Tahun 2019 dan 2024

No	Nama Desa	Data Partisipasi 2019	Data Partisipasi 2024
1	Purba Tengah	713	855
2	Pematang Purba	1.137	1.620
3	Urung Purba	991	1.147
4	Purba Sipingga	1.102	1.254
5	Hinalang	1.167	1.586
6	Purba Dolok	606	702
7	Tano Tinggir	427	603
8	Tiga Runggu	1.884	3.020
9	Saribu Jandi	636	817
10	Huta Raja	503	538
11	Bandar Sauhur	376	474
12	Bunga Sampang	264	364
13	Nagori Tengah	574	634
14	Urung Pane	899	1.025
	Total	11.279	14.639

Sumber: KPU Kabupaten Simalungun 2019 dan 2024

Berdasar pada tabel yang disajikan, menyatakan bahwasanya pemilih tetap paling banyak ada di Tiga Runggu, pada tahun 2019 sebesar 1.884 dan pada tahun 2024 sebesar 3.020. Desa Purba Tengah pada tahun 2019 sebanyak 713 dan pada 2024 sebanyak 855 pemilih, Desa Pematang Purba pada tahun 2019 sebanyak 1.137 dan pada tahun 2024 sebanyak 1.620 pemilih, Desa Urung Purba 2019 sebanyak 991 dan 2024 sebanyak 1.147 pemilih, Desa Purba Sipingga 2019 sebanyak 1.102 dan 2024

⁹ KPU Kabupaten Simalungun 2024

sebanyak 1.254 pemilih, Desa Hinalang 2019 sebanyak 1.167 dan 2024 sebanyak 1.586 pemilih, Desa Purba Dolok 2019 sebanyak 606 dan 2024 sebanyak 702 pemilih, Desa Tano Tinggi 2019 sebanyak 427 dan 2024 sebanyak 603 pemilih, Desa Saribu Jandi 2019 sebanyak 636 dan 2024 sebanyak 817 pemilih, Desa Huta Raja pada tahun 2019 sebanyak 503 dan 2024 sebanyak 538 pemilih, Desa Bandar Sauhur 2019 sebanyak 376 dan 2024 sebanyak 474 pemilih, Desa Bunga Sampang pada 2019 sebanyak 264 dan 2024 sebanyak 364 pemilih, Desa Nagori Tongah tahun 2019 sebanyak 574 dan 2024 sebanyak 634 pemilih, Desa Urung Pane 2019 sebanyak 899 dan 2024 sebanyak 1.025 pemilih. Jumlah keseluruhan partisipasi pemilih pada tahun 2019 dan 2024 di Kecamatan Purba adalah 25.918 pemilih. Partisipasi pemilih di Kecamatan Purba mengalami peningkatan yang cukup banyak pada tahun 2024.¹⁰

Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena keberadaan alat peraga kampanye ini dapat mempengaruhi masyarakat yang melihat papan baliho tersebut. Dimana saat informasi disajikan maka individu masyarakat dapat memiliki pandangan dari sejumlah pendapat yang disajikan. Fenomena ini disebut sebagai opini publik, namun karakteristiknya cenderung berlaku pada masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi menengah hingga tinggi. Sebaliknya, opini yang terbentuk dapat berbeda pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah hingga menengah.

Sebagian besar warga dengan memiliki hak suara memperoleh data terkait anggota DPRD dari interaksi langsung kepada para tim sukses dari pasangan calon,

¹⁰ KPU Kabupaten Simalungun 2024

dan juga melalui alat peraga kampanye baliho. Mengetahui bahwa alat peraga kampanye (APK) sangat efektif maka para politisi dan tim suksesnya menggunakan alat peraga baliho guna mengsucceskan dalam mengkampanyekan pemilihan umum serta menghimpun sumber suara sebanyak mungkin.

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Gunawansyah (2015) membahas mengenai efektivitas iklan politik di media cetak harian *Lampung* dalam konteks pemilihan gubernur Lampung, khususnya pada pemilih pemula. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwasanya "iklan politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas media cetak, terutama dalam aspek desain iklan, rekam jejak, visi-misi, profil, serta program kandidat." Temuan ini mengindikasikan bahwa pemilih pemula tidak dipengaruhi oleh pesan yang terkandung dalam iklan tersebut. Sebaliknya, mereka lebih terpengaruh oleh faktor eksternal, seperti frekuensi kemunculan iklan, lokasi penempatan iklan, serta ukuran iklan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aris Gunawansyah (2015), media kampanye seperti bendera, umbul-umbul, spanduk, banner, stiker, poster, buklet, brosur, dan sejenisnya terbukti lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada pemilih selama proses pemilu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 memberikan landasan yang mendukung penggunaan alat peraga kampanye

sebagai sarana yang dinilai efektif untuk menyampaikan pesan dari calon kepala daerah kepada masyarakat.¹¹

Studi sebelumnya yang dilaksanakan Regina Yulandari dan Zainal Abidin yang berjudul “Pengaruh Iklan Politik Baliho Sebagai Bagian Dari Strategi Kampanye T. Irwan Djohan Pada Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh Tahun 2014”. Salah satu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan baliho untuk sarana mengiklankan politik terbukti sangat efektif dalam membangun simpati masyarakat. Efektivitas ini tercapai melalui penyampaian pesan-pesan yang konstruktif, termasuk visi dan misi kandidat. Selain itu, baliho juga mampu merepresentasikan citra diri politisi, baik melalui foto, latar belakang pendidikan, maupun afiliasi partai pendukung. Sebagai salah satu strategi iklan politik, baliho dapat menjadi alat yang andal untuk mendukung keberhasilan kampanye. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada strategi penempatan dan penyajian iklan yang dilakukan oleh kandidat.¹²

Hilmi pada tahun 2014. Judul Penelitian “Analisis Semiotika pada Poster Kampanye Partai Politik Islam (Studi Kasus Calon Legislatif 2014 Dari PPP, PKB, PAN, dan PKS di Kota Semarang)” penelitian ini menemukan : bahwa poster

¹¹ Gunawahsyah, Aris. Skripsi. 2015. Efektifitas Iklan Politik Media Cetak Harian Lampung Tentang Pemilihan Gubernur Lampung Terhadap Khalayak Pemilih Pemula. Lampung: Universitas Lampung.

¹²Regina Yulandari dan Zainal Abidin, Pengaruh Iklan Politik Baliho sebagai Bagian dari Strategi Kampanye T. Irwan Djohan pada Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh Tahun 2014 (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014),

kampanye menggunakan simbol-simbol budaya, agama, dan nasionalisme untuk menarik simpati masyarakat. Simbol agama seperti warna hijau dan elemen visual Islami sering digunakan untuk menegaskan identitas partai politik Islam. Selain itu, teks pesan cenderung menonjolkan kesan kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, dan janji-janji politik yang religius. Selain itu, penggunaan warna dalam konteks ini didominasi oleh warna hijau, terutama terkait dengan PPP dan PKB. Namun, PPP menunjukkan keberanian lebih besar dibandingkan PKB dengan mengintegrasikan elemen warna merah ke dalam dominasi hijau yang mereka gunakan. Poster Denawati Utami Wardhani mencerminkan pertimbangan geopolitik kota Semarang yang memiliki basis kuat pada PDIP, sementara PAN memanfaatkan kombinasi warna kuning dan biru, serta perpaduan merah muda dan hijau. Adapun PKS cenderung menggunakan kombinasi warna putih dan kuning. Perpaduan warna yang dipilih dirancang agar mudah diterima secara visual, meskipun tetap mengandung potensi risiko tertentu.¹³

Perbedaan dan kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus kajian. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi pada tahun 2014 memiliki perbedaan signifikan, yakni hanya menyoroti aspek bahasa visual (gambar) yang terdapat dalam poster kampanye sedang pada studi ini berfokus untuk mengkaji Bahasa visual (gambar) dan nonvisual (tagline). Pada penelitian Aris

¹³ Hilmi, Analisis Siematika pada Poster Kampanye Partai Politik Islam: Studi Kasus Calon Legislatif 2014 dari PPP, PKB, PAN, PKS di Kota Semarang.

Gunawansyah (2015) membahas Iklan politik tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas media cetak, khususnya jika ditinjau dari aspek desain iklan, rekam jejak, visi-misi, profil, serta program kandidat. Dan Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Regina Yulandari dan Zainal Abidin membahas tentang baliho memiliki peran yang signifikan dalam kampanye politik karena kemampuannya untuk menarik perhatian publik melalui penyampaian pesan-pesan yang konstruktif, serta pengenalan terhadap visi dan misi calon. Selain itu, baliho juga menjadi sarana strategis bagi politisi untuk membangun citra diri mereka dengan menampilkan foto, latar belakang pendidikan, dan identitas partai politik yang mendukung mereka, sehingga memperkuat legitimasi dan kedekatan dengan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa jurnal membahas tentang alat peraga kampanye dan iklan politik media cetak. Dimana penelitian ini menguatkan tentang baliho sebagai media kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di kecamatan purba kabupaten simalungun Sumatera utara pada pemilihan legislatif 2024.

Bertolak dari latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai baliho sebagai media kampanye dan analisa terhadap meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sehingga penulis mengambil judul **“Baliho sebagai alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik**

masyarakat di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif tahun 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang permasalahan yang diuraikan, peneliti mendapati perumusan permasalahannya yakni:

1. Bagaimanakah penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dengan berdasar pada perumusan permasalahan yang ditentukan diatas, yakni :

1. Guna memahami dan menganalisis sejauh mana baliho sebagai alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada pemilihan legislatif tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Kebermanfaatan yang diharapkan penelitian dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, Penulis berharap penelitian ini akan mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik, khususnya tentang baliho sebagai media kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba pada pemilihan legislatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap bisa dijadikan rujukan atau pertimbangan bagi penelitian selanjutnya oleh mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, serta untuk memberi penulisan lebih banyak wawasan atau pengetahuan untuk memenuhi syarat akademik dan menyelesaikan suatu titik program studi Ilmu Politik Universitas Jambi.

1.5 Landasan Teori

Pendekatan Komunikasi Politik

Dalam konteks sistem politik, komunikasi politik berlangsung antara pihak penguasa dan masyarakat, baik melalui interaksi yang berhubungan dengan kebijakan politik maupun melalui pemberian dukungan atau pengajuan tuntutan dari masyarakat kepada penguasa.¹⁴ Komunikasi politik terbentuk atas gabungan dua istilah, yakni "komunikasi" dan "politik." Hubungan antara kedua istilah ini dianggap sangat signifikan dan khas, mengingat komunikasi memiliki peran yang krusial dalam dunia

¹⁴ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, terj. Tjun Surjaman, pengantar Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 12–60.

politik. Meskipun demikian, teknik komunikasi telah memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai partisipasi politik.

Komunikasi politik mencakup seluruh bentuk komunikasi yang berlangsung dalam dan antar sistem politik serta hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Muller memandang komunikasi politik sebagai produk dari faktor-faktor seperti kelas sosial, proses sosialisasi, pola bahasa, dan hasil politik. Di sisi lain, Gallnor berpendapat bahwasanya komunikasi politik berfungsi sebagai sarana politik, yang terdiri atas beragam bentuk kontak sosial yang mendistribusikan data mengenai upaya kolektif dan hubungan kekuasaan.¹⁵

Didasarkan pada definisi-definisi sebelumnya, komunikasi politik dapat dipahami sebagai penyampaian pesan yang menekankan simbol atau informasi yang memiliki makna penting, yang berhubungan dengan atau mempengaruhi dinamika dan sistem politik. Komunikasi politik jenis ini dapat mencapai audiens atau target politik melalui berbagai saluran media massa, terutama melalui penggunaan APK.

Komunikasi politik mencakup atas lima komponen, yaitu pengirim (komunikator), pesan politik, saluran atau media politik, penerima atau audiens, serta dampak. Menurut Nimmo (1978),¹⁶ berbagai aspek pada komunikasi politik yakni:

¹⁵Effendy, Onong U, 2005. Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek), Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 21-25.

¹⁶ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, terj. Tjun Surjaman, pengantar Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 12–60.

a. Sumber (komunikator)

Komunikasi politik melibatkan berbagai aktor dan institusi, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, serta partai politik. Dengan demikian, pihak yang bertindak sebagai pengirim atau komunikator politik yaitu individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi yang relevan atau signifikan dalam konteks politik. Contoh komunikator politik meliputi presiden, menteri, anggota DPR, KPU, gubernur, bupati, wali kota, politisi yang mewakili partai politik, pengelola LSM, serta berbagai kelompok lain yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan.¹⁷

b. Pesan politik

Pesan politik merujuk pada informasi yang dapat disampaikan melalui berbagai bentuk, baik tertulis maupun lisan, verbal maupun non-verbal, secara eksplisit maupun implisit, serta disadari maupun tidak disadari, yang di dalamnya terkandung muatan politik.

c. Saluran atau media politik

Media politik atau saluran komunikasi politik merupakan perantara dimanfaatkan para pengirim pesan untuk menyalurkan informasi politik terhadap masyarakat luas. Pada konteks ini, media politik mencakup berbagai bentuk APK, seperti bendera, spanduk, banner, dan lain-lain.

¹⁷ *Ibid*, hlm 15

d. Sasaran atau target politik

Kelompok target merujuk pada segmen masyarakat yang diharap memberikan kontribusi berupa partisipasi melalui keterlibatan aktif dalam Pemilihan Umum, khususnya dengan memberikan suara kepada partai politik atau kandidat tertentu.

e. Pengaruh atau efek komunikasi politik

Dampak yang diproyeksikan dari komunikasi politik ialah terbentuknya pengetahuan yang mendalam mengenai mekanisme pemerintahan serta kelompok politik, sehingga akan menstimulasi kontribusi rakyat untuk memberikan suara pada pemilihan umum.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm 16.

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada studi ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif yang mana guna mengidentifikasi jawaban dugaan diawal studi serta dalam rangka menjadi pedoman pada tahapan yang akan diputuskan dalam rangka memberikan sikap atas informasi terkait baliho sebagai media kampanye untuk peningkatan kontribusi publik di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif 2024.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah berlandaskan pada filsafat, seperti postpositivisme dilakukan terhadap objek alamiah, pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi atau kombinasi berbagai teknik. Proses analisis data bersifat induktif, di mana peneliti lebih mengutamakan pemahaman terhadap makna yang mendalam daripada menghasilkan kesimpulan yang bersifat generalisasi data kualitatif berbentuk kalimat.¹⁹ Adapun pendekatan kualitatif dipilih pada penelitian ini telah menggambarkan lebih jelas mengenai baliho sebagai media

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 225

kampanye untuk peningkatan kontribusi publik di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan Kawasan yang memiliki tingkat akses jaringan internet yang cukup sulit. Kecamatan Purba menjadi daerah yang menarik untuk diteliti karena penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye masih sangat efektif untuk memengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilihan legislatif.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi “Baliho sebagai alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif tahun 2024” adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam dan menganalisis secara kritis peran baliho sebagai salah satu bentuk alat peraga kampanye (APK) dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana baliho, sebagai media komunikasi politik dan juga menyoroti sejauh mana baliho mampu membentuk persepsi politik masyarakat, memengaruhi preferensi pemilih, serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pemilu, terutama di

wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap media digital dan informasi berbasis teknologi.

1.7.4 Sumber Data

Ada 2 (dua) jenis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli (*responden*), tanpa melalui perantara. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di tempat. Data utama penelitian ini adalah data terkait daftar pemilih tetap yang dipelohen dari KPU, Bawaslu Kabupaten Simalungun dan masyarakat pemilih yang berada di dapil Simalungun 1 Kecamatan Purba.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu informasi yang didapatkan dengan tidak langsung melalui perantara, seperti individu lain, media, atau dokumen. Data ini bersumber dari pihak kedua yang mendukung pengumpulan data penelitian.²⁰ Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang didapati dari beragam sumber, termasuk dokumen, buku, skripsi, artikel jurnal, internet, berita daring, serta wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun.

²⁰ *Ibid*, hlm. 225.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Pada studi ini untuk menentukan informan dipergunakan metode *purposive sampling* yaitu peneliti menentukan berdasarkan individu tau kriteria tertentu yang sangat relevan dengan topik penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan penggunaan baliho dalam kampanye politik.

Informan yang akan menjadi sumber informasi bagi penulis dalam penelitian ini adalah:

No	Nama Informan	Jabatan
1	Fadly Hamdi Lubis	Ketua Divisi Teknis KPU
2	Boy Chando H. Purba	Anggota Bawaslu Kab. Simalungun
3	M. Chrismes Haloho	Anggota DPRD Kab. Simalungun
4	Radisna Silalahi	Calon anggota DPRD Kab. Simalungun
5	Ame Ovtasari Sumbayak	Masyarakat Huta Raja
6	Dominta Siboro	Masyarakat Bunga Sampang
7	Ismail Saragih	Masyarakat Purba Dolok
8	Sriani Malau	Masyarakat Urung Pane

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan informasi guna kepentingan riset ini, diterapkan sejumlah metode berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap interaksi sosial masyarakat Kecamatan Purba yang berkaitan dengan keberadaan baliho sebagai alat peraga kampanye pada Pemilu Legislatif 2024. Pengamatan mencakup respons masyarakat terhadap isi, posisi, dan simbol-simbol pada baliho, baik dalam bentuk perhatian visual, percakapan spontan, maupun sikap non verbal. Observasi ini penting untuk menangkap dinamika sosial politik yang tidak selalu terungkap dalam wawancara, termasuk bagaimana baliho membentuk persepsi publik, memicu diskusi politik, dan mendorong partisipasi pemilih di wilayah yang masih terbatas akses media digitalnya.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan masyarakat Kecamatan Purba, khususnya individu yang memiliki perhatian, keterlibatan, atau pengalaman langsung terkait keberadaan baliho sebagai alat peraga kampanye dalam Pemilu Legislatif 2024. Tujuannya adalah untuk menggali persepsi, pandangan, serta pengalaman informan terhadap efektivitas baliho dalam menyampaikan pesan politik dan mendorong partisipasi dalam pemilihan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan menggunakan panduan pertanyaan sebagai kerangka dasar, namun tetap memberikan

ruang yang fleksibel bagi responden untuk mengungkapkan opini, interpretasi, dan pengalaman pribadi mereka secara terbuka dan bebas.

c. Dokumentasi

Peneliti telah mengumpulkan data dari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan kegiatan, foto, dokumen resmi pemerintah terkait pemilu dan materi-materi lain yang relevan untuk mendukung analisis.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Teknik ini melibatkan proses kategorisasi, pengkodean, tabulasi, atau pengelompokan data sehingga menghasilkan temuan yang bermakna.²¹ Fokus utama diarahkan pada efektivitas baliho dalam menjangkau masyarakat secara luas, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap media digital. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana keberadaan baliho di ruang publik memengaruhi kesadaran politik untuk mendorong keterlibatan aktif dalam proses pemilu.

²¹ Bungin dan Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 150.

a. Reduksi Data

Dalam tahap reduksi data, proses pengumpulan data bertujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, serta mentransformasikan data mentah yang diperoleh melalui wawancara. Setelah tahap pengumpulan data selesai, data yang berkaitan dengan baliho akan mengalami proses reduksi untuk memperoleh informasi yang relevan terkait baliho sebagai media kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif 2024.

b. Penyajian Data

Penyajian data ialah menyusun data yang berstruktur ssesuatu yang telaah dirancang. Data disajikan dnegan tujuan mempermudah untuk dibaca serta disimpulkan.²² Melalui pencermatan sajian informasi ini akan memudahkan peneliti dalam mengkaji realita yang ada serta langkah yang nantinya dilaksanakan dalam penelitian baliho sebagai media kampanye untuk peningkatan kontribusi publik terhadap politik di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif 2024.

²² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rienaka Cipta, 2008, hlm. 123.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap penutupan yang berperan kunci pada sebuah studi, dengan tujuannya menginterpretasikan hasil temuan dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Secara khusus, kesimpulan memberikan jawaban terhadap perumusan permasalahan yang ditentukan pada permulaan penelitian, menyimpulkan temuan-temuan yang ada berkenaan dengan baliho sebagai media kampanye untuk peningkatan kontribusi publik terhadap politik di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif 2024.

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Keabsahan data dalam penelitian ini merujuk pada validitas dan keterandalan informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Validitas data dijaga dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar relevan, akurat, dan merepresentasikan kenyataan sosial di lapangan, khususnya terkait persepsi dan respons masyarakat terhadap baliho sebagai alat peraga kampanye.

Triangulasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan keabsahan data dengan memadukan berbagai sumber informasi, metode pengumpulan data, atau sudut pandang teoretis yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai sumber data, seperti wawancara dengan masyarakat, anggota KPU, anggota bawaslu dan calon legislatif

(baik yang terpilih maupun tidak terpilih), untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai efektivitas baliho dalam memengaruhi partisipasi politik. Triangulasi juga dilakukan melalui penggunaan beragam teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi langsung terhadap interaksi sosial di Kecamatan Purba, serta dokumentasi visual alat peraga kampanye.